KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

E3I5L53N

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 3 8 4			H.4 X Final			
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatalai	n	H.5 .	Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 68 807 587 8 722 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : RETNO EKO SAYEKTI AS							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
4 21-402-01	2.227.200	2.227.200	0	15	334.080		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 037/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mmyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.2 Nama Instansi Pemerintah :	: RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.3 ID Subunit Organisasi :							
C.4 Tanggal :	1 3 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :	HARI JUMADI						
	Dengan ini saya menyatakan ba tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	an Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya		
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.							